



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

ABSTRACT

ABSTRAK

MONARISA SALSABILLA

2015

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL
SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH
KUALA**

(v, 52p) pp., bibl.

T.HAFLISYAH, S.H., M.Hum

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk atau jasa yang ditawarkannya. Namun pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk kosmetik yang dijual secara online.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli secara online, bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik secara online, upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar.

Sesuai dengan bahan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan gejala yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh kemudian disusun untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwadalam transaksi jual beli secara online ada empat tahap, yaitu: penawaran suatu produk, penerimaan yang dapat dilakukan sesuai penawaran, pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer via anjungan tunai mandiri (ATM), dan pengiriman barang. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh undang-undang dengan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian dapat memberikan pengaduan kepada pihak yang terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).

Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat mencantumkan notifikasi pada produk kosmetik yang diperjualbelikan agar memudahkan konsumen untuk dapat membedakan produk legal dan produk ilegal, kepada konsumen diharapkan untuk dapat teliti sebelum menggunakan suatu produk kosmetik agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.